

SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA (SPAB): STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MEMBANGUN BUDAYA KESIAPSIAGAAN

Kasmudin¹, Mu'minah², Normawati³, Aida Bilhairi⁴, Gusriawan⁵, Rustam⁶, Asmawati⁷

¹²³⁴⁵⁶Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Corresponden E-mail: mu_minah@outlook.com

Abstract

This paper aims to analyze the strategic role and leadership style of school principals in integrating the Comprehensive School Safety (CSS) framework into school operations. This qualitative literature review uses content analysis of regulations, policy documents, and relevant academic literature. The discussion shows that SPAB implementation depends strongly on principals' capacity to lead under VUCA conditions (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Three strategic leadership dimensions are emphasized: (1) structural leadership to secure learning facilities and allocate mitigation resources; (2) cultural leadership to build collective awareness and integrate disaster risk reduction into learning; and (3) network leadership to strengthen multi-stakeholder collaboration. The paper further argues that effective SPAB requires a shift from reactive administration toward proactive, risk-informed, participatory leadership. School safety should be institutionalized through planning, standard operating procedures, simulation, communication, monitoring, and continuous improvement. The findings have implications for principal development, school governance, curriculum implementation, and educational continuity in disaster-prone contexts.

Keywords: Disaster Safe Education Unit (SPAB), Principal Leadership, Disaster Mitigation, Risk Management, Comprehensive School Safety

Abstrak

Penulisan ini bertujuan menganalisis peran strategis dan gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam mengintegrasikan kerangka Comprehensive School Safety (CSS) ke dalam operasional sekolah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review) dan analisis isi terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPAB sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam menghadapi situasi VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Tiga dimensi kepemimpinan strategis yang menjadi fokus ialah: (1) kepemimpinan struktural untuk memastikan fasilitas belajar aman dan dukungan sumber daya; (2) kepemimpinan kultural untuk membangun kesadaran kolektif serta mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam pembelajaran; dan (3) kepemimpinan jejaring untuk memperkuat kolaborasi multipihak. Kajian ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dari manajemen reaktif menuju kepemimpinan proaktif, berbasis risiko, partisipatif, komunikatif, dan berorientasi pada keberlanjutan layanan pendidikan. Budaya keselamatan perlu dilembagakan melalui perencanaan, SOP kedaruratan, simulasi, komunikasi krisis, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan.

Kata Kunci: Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB); Kepemimpinan Kepala Sekolah; Mitigasi Bencana; Manajemen Risiko; Comprehensive School Safety; Ketangguhan Pendidikan

PENDAHULUAN

Satuan pendidikan merupakan salah satu ruang publik yang sangat strategis dalam membangun perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang perlindungan anak, pusat interaksi sosial, serta salah satu institusi yang dapat mempercepat penyebaran pengetahuan kebencanaan kepada keluarga dan komunitas. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman ancaman geologis, hidrometeorologis, biologis, teknologi, dan sosial, keselamatan sekolah tidak dapat diposisikan sebagai program tambahan yang berdiri di luar

manajemen pendidikan. Keselamatan harus menjadi bagian dari tata kelola sekolah, perencanaan pembelajaran, pengelolaan sarana-prasarana, pengembangan sumber daya manusia, serta hubungan sekolah dengan masyarakat (BNPB, 2020; GADRRRES, 2022).

Kerangka Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) hadir sebagai pendekatan untuk memastikan warga satuan pendidikan terlindungi dan layanan pendidikan tetap berlangsung sebelum, saat, dan setelah bencana. Dalam naskah awal, SPAB dipahami tidak semata-mata sebagai sekolah dengan bangunan yang lebih kuat, tetapi sebagai sistem yang menggabungkan fasilitas belajar aman, manajemen bencana sekolah, serta pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Kerangka Comprehensive School Safety (CSS) 2022–2030 kemudian memperluas perspektif tersebut melalui pendekatan all-hazards, all-risks dan menempatkan keberlanjutan pendidikan, perlindungan anak, serta ketangguhan sebagai tujuan utama (GADRRRES, 2022).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar kebijakan yang mendukung penyelenggaraan SPAB. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 memberikan kerangka teknis penyelenggaraan SPAB pada satuan pendidikan. Perkembangan kebijakan dan praktik hingga 2025 menunjukkan bahwa SPAB tetap menjadi agenda pendidikan yang aktif, termasuk penguatan kapasitas pendidik, latihan evakuasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pemulihan layanan pendidikan pada wilayah terdampak bencana (Kemendikdasmen, 2025).

Persoalan utama yang kemudian muncul bukan lagi sekadar apakah regulasi telah tersedia, tetapi bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku organisasi yang konsisten. Di tingkat sekolah, kepala sekolah menjadi aktor penting karena memiliki posisi untuk mengarahkan visi, menetapkan prioritas, mengorganisasi sumber daya, mengoordinasikan warga sekolah, dan membangun kemitraan eksternal. Dengan demikian, keberhasilan SPAB sangat berkaitan dengan kualitas kepemimpinan. Kepala sekolah perlu bergerak dari peran administratif menuju kepemimpinan keselamatan yang mampu mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam seluruh siklus manajemen sekolah (Bush, 2020).

Situasi bencana juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan sekolah berlangsung dalam lingkungan VUCA. Volatility menggambarkan perubahan yang cepat; uncertainty menunjukkan keterbatasan kepastian; complexity menandai banyaknya faktor yang saling berhubungan; sedangkan ambiguity menunjukkan situasi yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Dalam kondisi demikian, pemimpin tidak cukup hanya memiliki prosedur tertulis. Ia memerlukan kemampuan mengambil keputusan cepat, mengelola komunikasi, menjaga kepercayaan, membagi peran, dan memastikan keselamatan menjadi dasar setiap keputusan. Kajian tentang kepemimpinan krisis menunjukkan bahwa komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, kepedulian, dan inovasi menjadi kompetensi penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan ketika terjadi krisis (Schechter, Da'as, & Qadach, 2024; Altun, 2025).

SPAB dapat dipahami sebagai sistem tata kelola risiko pada satuan pendidikan. Perspektif ini penting karena risiko tidak hanya muncul dari bahaya alam. Kerangka CSS 2022–2030 menggunakan pendekatan all-hazards, all-risks yang mencakup bahaya alam dan perubahan iklim, bahaya teknologi, risiko biologis dan kesehatan, konflik dan kekerasan, serta bahaya sehari-hari. Karena itu, sekolah aman bukan hanya sekolah yang siap menghadapi gempa atau tsunami, tetapi sekolah yang memiliki sistem untuk mengidentifikasi, mengurangi, merespons, dan

memulihkan berbagai risiko yang berpotensi mengganggu keselamatan dan proses pendidikan (GADRRRES, 2022).

Dalam kerangka tersebut terdapat fondasi berupa enabling systems and policies serta tiga pilar yang saling berhubungan. Pilar pertama adalah Safer Learning Facilities, yang berkaitan dengan keamanan dan keberlanjutan bangunan, infrastruktur, dan lingkungan sekitar. Pilar kedua adalah School Safety and Educational Continuity Management, yang menekankan penilaian risiko, kesiapsiagaan respons, manajemen keselamatan, dan rencana keberlanjutan pendidikan. Pilar ketiga adalah Risk Reduction and Resilience Education, yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik serta warga sekolah agar mampu mengurangi risiko dan membangun ketangguhan (GADRRRES, 2022).

Ketiga pilar tersebut tidak dapat berjalan apabila kepemimpinan sekolah tidak mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan budaya organisasi. Kepemimpinan struktural diperlukan untuk memastikan sistem, anggaran, fasilitas, dan pembagian tugas. Kepemimpinan instruksional diperlukan untuk memastikan pengurangan risiko bencana masuk ke proses pembelajaran. Kepemimpinan transformasional diperlukan untuk mengubah cara pandang warga sekolah sehingga keselamatan menjadi nilai bersama. Sementara itu, kepemimpinan jejaring dibutuhkan karena kapasitas sekolah selalu terbatas dan membutuhkan dukungan BPBD, puskesmas, pemadam kebakaran, komite sekolah, pemerintah daerah, orang tua, organisasi kemasyarakatan, dan mitra lainnya.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kepala sekolah menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Fungsi tersebut dapat diterapkan dalam SPAB melalui siklus yang lebih spesifik. Pada tahap perencanaan, sekolah melakukan pemetaan ancaman, kerentanan, kapasitas, serta kebutuhan prioritas. Pada tahap pengorganisasian, dibentuk tim dan pembagian peran. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan peningkatan kapasitas, penyediaan fasilitas, simulasi, dan integrasi pembelajaran. Pada tahap pengawasan, sekolah memeriksa kepatuhan terhadap SOP dan kesiapan sarana. Pada tahap evaluasi, hasil simulasi maupun kejadian aktual digunakan sebagai dasar perbaikan.

Dengan demikian, kepemimpinan SPAB bukanlah satu gaya kepemimpinan tunggal. Kepala sekolah membutuhkan kombinasi kepemimpinan struktural, kultural, instruksional, transformasional, dan jejaring. Temuan utama naskah awal yang membagi kepemimpinan SPAB ke dalam tiga dimensi struktural, kultural, dan jejaring tetap menjadi kerangka utama artikel ini. Dimensi lain ditempatkan sebagai kompetensi yang memperkuat ketiga dimensi tersebut, sehingga tidak mengubah inti argumentasi awal, tetapi memperjelas mekanisme bagaimana kepemimpinan bekerja dalam sistem sekolah aman.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Pemilihan pendekatan ini sesuai dengan tujuan artikel, yaitu menganalisis dan mensintesis gagasan tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi SPAB berdasarkan regulasi, kerangka kebijakan, dokumen teknis, dan literatur akademik. Sumber utama yang menjadi dasar naskah awal meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana, dokumen BNPB, dokumen Sekretariat Nasional SPAB, Comprehensive School Safety Framework, serta literatur kepemimpinan dan manajemen pendidikan.

Pengembangan kajian dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan empat kata kunci konseptual: SPAB, school safety, disaster risk reduction education, dan school leadership/crisis leadership. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan kajian, kontribusinya terhadap pemahaman kepemimpinan dalam kondisi krisis, serta keterkaitannya dengan tiga pilar CSS. Literatur yang bersifat kebijakan digunakan untuk menjelaskan kerangka normatif, sedangkan artikel ilmiah digunakan untuk memperkaya interpretasi mengenai perilaku kepemimpinan, kesiapsiagaan, kolaborasi, komunikasi, dan keberlanjutan pendidikan.

Analisis data menggunakan analisis isi. Tahapan analisis meliputi identifikasi sumber, pengelompokan informasi, pengkodean tema, perbandingan antarsumber, interpretasi, dan sintesis. Tema yang digunakan adalah: (1) kepemimpinan struktural dan fasilitas aman; (2) kepemimpinan kultural dan budaya siaga; (3) kepemimpinan jejaring dan kolaborasi multipihak; (4) kepemimpinan dalam situasi VUCA; (5) komunikasi krisis; (6) pendidikan pengurangan risiko; dan (7) keberlanjutan layanan pendidikan. Hasil sintesis kemudian dibandingkan dengan kerangka CSS untuk memastikan konsistensi antara temuan literatur dan kerangka SPAB.

Artikel ini tidak mengklaim menghasilkan data empiris primer dari satu sekolah tertentu. Karena itu, istilah “hasil” dalam artikel merujuk pada hasil sintesis dan interpretasi literatur. Keterbatasan tersebut penting ditegaskan agar pembaca tidak memahami uraian sebagai temuan survei lapangan. Kontribusi artikel terletak pada konstruksi konseptual mengenai strategi kepemimpinan kepala sekolah yang dapat digunakan sebagai kerangka analitis maupun acuan pengembangan program SPAB. Untuk menjaga keterlacakan akademik, setiap gagasan utama yang berasal dari sumber tertentu diberi catatan dalam kurung menggunakan pola author-date, sedangkan regulasi ditulis berdasarkan nama lembaga dan tahun. Dengan format ini, pembaca dapat menelusuri hubungan antara argumen artikel dan sumber rujukan. Daftar pustaka pada bagian akhir juga disusun dengan mengurangi duplikasi sumber yang terdapat pada naskah awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan dalam situasi bencana berbeda secara fundamental dari manajemen rutin. Dalam keadaan normal, kepala sekolah dapat bekerja berdasarkan kalender akademik, prosedur yang stabil, dan pembagian kerja yang relatif dapat diprediksi. Ketika bencana terjadi, asumsi tersebut dapat berubah secara tiba-tiba. Infrastruktur mungkin rusak, komunikasi terputus, peserta didik terpisah dari keluarga, guru memiliki kebutuhan pribadi, dan informasi yang tersedia belum lengkap. Oleh sebab itu, pemimpin perlu menggunakan prinsip risk-informed decision making, yaitu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan risiko yang diketahui sekaligus mengakui adanya ketidakpastian.

Kondisi VUCA menuntut kepala sekolah memiliki kemampuan sensemaking, yaitu kemampuan memahami situasi dan memberikan makna yang dapat dijadikan pedoman tindakan bersama. Kepala sekolah tidak cukup mengatakan bahwa “sekolah harus siap bencana”, tetapi perlu menerjemahkannya menjadi pertanyaan operasional: bahaya apa yang paling mungkin terjadi, siapa yang paling rentan, jalur evakuasi mana yang aman, siapa yang menghubungi orang tua, siapa yang bertanggung jawab terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, bagaimana pembelajaran dilanjutkan, dan kapan sekolah dapat kembali beroperasi. Dengan demikian, visi keselamatan harus diterjemahkan menjadi keputusan yang dapat diamati.

Literatur kepemimpinan krisis menunjukkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Studi Altun (2025) mengenai kepala sekolah pascagempa menunjukkan bahwa koordinasi dengan

pemerintah lokal, keluarga, organisasi masyarakat, serta penguatan keterampilan manajemen krisis merupakan unsur penting. Temuan tersebut memperkuat argumentasi artikel ini bahwa kepala sekolah tidak dapat mengelola bencana secara individual. Kepemimpinan efektif justru ditunjukkan melalui kemampuan mengorkestrasi sumber daya yang tersebar di dalam dan di luar sekolah.

Pada saat yang sama, kepala sekolah harus menjaga keseimbangan antara ketegasan dan partisipasi. Dalam keadaan darurat, beberapa keputusan memang membutuhkan komando yang cepat. Namun sebelum bencana, pembangunan kesiapsiagaan membutuhkan partisipasi. Warga sekolah harus dilibatkan dalam pemetaan risiko, penyusunan SOP, simulasi, evaluasi, dan perbaikan. Dengan demikian, pola kepemimpinan dapat berubah sesuai fase: partisipatif dan deliberatif pada tahap kesiapsiagaan, lebih direktif pada tahap tanggap darurat, dan kolaboratif pada tahap pemulihan.

Perspektif ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan SPAB bukan sekadar persoalan gaya, melainkan kemampuan menyesuaikan perilaku kepemimpinan dengan kebutuhan situasi. Kepala sekolah yang selalu menggunakan pendekatan komando dapat menghambat partisipasi pada tahap mitigasi, sedangkan pemimpin yang terlalu deliberatif dapat memperlambat keputusan kritis pada fase darurat. Karena itu, kompetensi adaptif menjadi bagian penting dari kepemimpinan SPAB.

Kepemimpinan Struktural: Memastikan Fasilitas Belajar Aman

Dimensi pertama yang menjadi temuan utama naskah awal adalah kepemimpinan struktural. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan bahwa lingkungan fisik sekolah tidak menambah risiko bagi warga sekolah. Penilaian tidak boleh berhenti pada tampilan bangunan, tetapi harus mencakup struktur, instalasi listrik, plafon, kaca, lemari, laboratorium, akses keluar, titik kumpul, kondisi pagar, sumber air, alat pemadam, serta akses bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. CSS menempatkan safer learning facilities sebagai pilar penting karena kerusakan fasilitas dapat mengakibatkan korban sekaligus menghambat pemulihan pendidikan (GADRRRES, 2022).

Kepemimpinan struktural juga berkaitan dengan penganggaran. Kepala sekolah harus memastikan kebutuhan keselamatan masuk dalam prioritas perencanaan dan anggaran sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsipnya bukan membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, melainkan mengarahkan sumber daya pada risiko yang paling kritis. Misalnya, apabila hasil pemetaan menunjukkan jalur evakuasi tidak jelas, prioritas dapat diarahkan pada rambu, akses, penerangan, dan titik kumpul. Apabila risiko kebakaran tinggi, kebutuhan alat pemadam, pemeriksaan instalasi, dan pelatihan penggunaan alat menjadi prioritas.

Audit fasilitas perlu dilakukan secara periodik dan melibatkan pihak yang memiliki kompetensi teknis ketika diperlukan. Naskah awal menekankan bahwa renovasi sekolah tidak boleh hanya bersifat kosmetik. Prinsip build back better mengingatkan bahwa pemulihan pascabencana harus mengurangi risiko masa depan, bukan sekadar mengembalikan bangunan pada kondisi sebelum bencana (Maly, 2018). Dengan demikian, kepala sekolah perlu mengembangkan budaya pemeriksaan dan pemeliharaan, bukan hanya tindakan perbaikan setelah terjadi kerusakan.

Pada fase tanggap darurat, kepemimpinan struktural berubah menjadi fungsi komando operasional. Kepala sekolah atau pejabat yang ditunjuk perlu memiliki kejelasan mengenai siapa yang memberikan instruksi evakuasi, siapa yang melakukan pencatatan peserta didik, siapa yang

berkomunikasi dengan orang tua, siapa yang berkoordinasi dengan layanan darurat, dan siapa yang mengelola informasi publik. Rencana operasi darurat yang jelas dapat mengurangi kebingungan dan duplikasi tindakan (FEMA, 2010).

Dengan demikian, fasilitas aman bukan hanya hasil kerja teknis. Ia merupakan produk keputusan kepemimpinan. Ketika keselamatan dimasukkan ke dalam RKS, RKAS, pengadaan, pemeliharaan, dan evaluasi, sekolah menunjukkan bahwa mitigasi telah menjadi bagian dari tata kelola. Sebaliknya, apabila keselamatan hanya muncul menjelang simulasi, program SPAB berisiko menjadi kegiatan seremonial.

Kepemimpinan Kultural: Membangun Budaya Siaga

Dimensi kedua adalah kepemimpinan kultural. Tantangan terbesar SPAB sering kali bukan membentuk struktur tim, tetapi mengubah cara berpikir warga sekolah. Budaya keselamatan berarti setiap individu memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama dan tercermin dalam kebiasaan sehari-hari. Kepala sekolah berperan sebagai model perilaku. Ia perlu menunjukkan bahwa SOP dipatuhi, simulasi dianggap serius, laporan risiko ditindaklanjuti, dan keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Budaya siaga dapat dibangun melalui pembiasaan. Simulasi evakuasi tidak seharusnya hanya dilakukan untuk memenuhi agenda tahunan. Latihan perlu dirancang berdasarkan skenario yang relevan dengan konteks sekolah dan diikuti evaluasi. Setelah simulasi, sekolah dapat mendiskusikan apa yang berjalan baik, bagian mana yang terlambat, siapa yang belum mengetahui perannya, dan bagaimana memperbaikinya. Pendekatan *experiential learning* penting karena pengetahuan deklaratif tentang bencana belum tentu menghasilkan keterampilan respons. Adiyoso dan Kanegae (2013) menunjukkan pentingnya desain pendidikan bencana yang sesuai agar kesiapsiagaan tidak berhenti pada pengetahuan.

Kepala sekolah juga perlu mengembangkan kepemimpinan yang memberikan ruang bagi peserta didik. Konsep *child-centred disaster risk reduction* menempatkan anak bukan hanya sebagai penerima perlindungan, tetapi juga sebagai agen perubahan. Peserta didik dapat terlibat dalam pemetaan sederhana, kampanye keselamatan, penyusunan poster, simulasi, kegiatan Pramuka/PMR, serta penyebaran pesan keselamatan kepada keluarga. Dengan cara ini, sekolah menjadi penghubung antara pengetahuan formal dan praktik keselamatan di rumah.

Integrasi ke dalam kurikulum perlu dilakukan secara kontekstual. Materi pengurangan risiko bencana dapat dihubungkan dengan IPA/Ilmu Pengetahuan, IPS, Bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, matematika, proyek, maupun kegiatan kokurikuler. Tujuannya bukan menambah beban mata pelajaran, tetapi memasukkan perspektif risiko ke dalam pembelajaran yang sudah berlangsung. UNESCO dan UNICEF (2014) menekankan pentingnya membangun *learning culture of safety and resilience* melalui integrasi pengurangan risiko bencana dalam kurikulum.

Budaya siaga juga berkaitan dengan kesejahteraan psikologis. Bencana dapat menimbulkan ketakutan, kehilangan, dan trauma. Karena itu, kepemimpinan kultural harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik dan guru mendapatkan dukungan psikososial. Pemulihan pendidikan tidak cukup diukur dari kapan kelas kembali berjalan, tetapi juga dari kemampuan sekolah memulihkan rasa aman, hubungan sosial, dan kepercayaan warga sekolah.

Kepemimpinan Jejaring: Kolaborasi Multipihak

Dimensi ketiga adalah kepemimpinan jejaring. Bencana memiliki karakter lintas sektor sehingga sekolah memerlukan dukungan dari banyak aktor. Kepala sekolah perlu membangun hubungan kerja dengan BPBD, dinas pendidikan, puskesmas, pemadam kebakaran, kepolisian sesuai kebutuhan, pemerintah desa/kelurahan, komite sekolah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, serta lembaga kemanusiaan. Kolaborasi tidak harus selalu berbentuk MoU formal; yang lebih penting adalah kejelasan peran, saluran komunikasi, dan prosedur koordinasi.

Kemitraan eksternal perlu dibangun sebelum bencana. Pada tahap kesiapsiagaan, pihak eksternal dapat membantu pelatihan, penilaian risiko, penyusunan SOP, simulasi, dan pengembangan kapasitas. Ketika bencana terjadi, jejaring yang telah dibangun akan mempersingkat waktu koordinasi. Kepala sekolah berfungsi sebagai jembatan diplomatik yang menghubungkan kebutuhan sekolah dengan kapasitas lembaga lain. Studi kepemimpinan krisis juga menegaskan bahwa kerja sama pemerintah, keluarga, komunitas, dan organisasi lain sangat penting dalam membangun ketahanan pendidikan (Altun, 2025).

Komite sekolah dan orang tua memiliki posisi penting dalam sistem jejaring. Salah satu persoalan yang dapat muncul saat evakuasi adalah penumpukan orang tua di gerbang sekolah. Jika prosedur penjemputan tidak disepakati sebelumnya, niat orang tua untuk melindungi anak justru dapat menghambat proses evakuasi. Karena itu, sekolah perlu mensosialisasikan titik penjemputan, mekanisme verifikasi, saluran informasi, serta aturan komunikasi saat darurat.

Jejaring juga perlu dirawat melalui komunikasi berkala. Hubungan tidak boleh hanya aktif ketika sekolah membutuhkan bantuan. Kepala sekolah dapat mengembangkan forum koordinasi, latihan bersama, pertukaran pengalaman, dan evaluasi pascasimulasi. Dengan demikian, kolaborasi berubah dari hubungan transaksional menjadi modal sosial organisasi.

Kelembagaan jejaring juga penting untuk menjaga keberlanjutan. Mutasi kepala sekolah atau guru dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan jika seluruh sistem SPAB bergantung pada individu. Karena itu, daftar kontak, SOP, struktur tim, kalender latihan, dokumen evaluasi, dan materi pelatihan perlu disimpan secara sistematis. Institusionalisasi memastikan budaya siaga tetap berjalan meskipun terjadi pergantian personel.

Komunikasi Krisis dan Pengambilan Keputusan

Komunikasi merupakan penghubung antara kepemimpinan struktural, kultural, dan jejaring. Dalam keadaan darurat, informasi yang lambat, tidak jelas, atau saling bertentangan dapat meningkatkan kepanikan. Karena itu, kepala sekolah perlu memiliki rencana komunikasi krisis yang menentukan siapa yang berwenang menyampaikan informasi, melalui saluran apa, kepada siapa, dan pada tahap mana. Informasi harus faktual, singkat, konsisten, dan menghindari spekulasi.

Komunikasi internal diarahkan kepada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan tim respons. Komunikasi eksternal diarahkan kepada orang tua, komite sekolah, pemerintah, layanan darurat, dan bila diperlukan media. Prinsip satu pintu informasi dapat digunakan untuk mencegah beredarnya pesan yang tidak terverifikasi. Namun satu pintu bukan berarti informasi ditutup. Transparansi tetap diperlukan, terutama mengenai kondisi peserta didik, keputusan operasional, perubahan jadwal, dan kebutuhan sekolah.

Kepala sekolah juga perlu memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijaksana. Grup pesan instan dapat menjadi kanal koordinasi cepat, tetapi harus ada aturan agar informasi kritis

tidak tenggelam di antara percakapan umum. Data sensitif peserta didik harus dilindungi. Untuk informasi resmi, sekolah dapat menggunakan kanal yang telah ditetapkan dan memastikan pesan yang beredar dapat diverifikasi.

Pengambilan keputusan dalam krisis perlu didasarkan pada prioritas keselamatan. Secara sederhana, urutan keputusan dapat dimulai dari penyelamatan jiwa, pengendalian risiko lanjutan, pengamanan informasi, pemulihan kebutuhan dasar, kemudian pemulihan pembelajaran. Prinsip ini membantu kepala sekolah menghindari keputusan yang berorientasi pada rutinitas ketika keselamatan belum terjamin.

Literatur tentang kepemimpinan bencana menunjukkan bahwa kepala sekolah sering menghadapi tuntutan untuk membuat keputusan operasional, logistik, komunikasi, dan hubungan dengan keluarga dalam waktu singkat (Potter, Pavlakis, & Roberts, 2021). Oleh karena itu, pelatihan SPAB sebaiknya tidak hanya berupa materi pengetahuan, tetapi juga latihan pengambilan keputusan berbasis skenario.

Pendidikan Pengurangan Risiko dan Kesiapsiagaan Peserta Didik

Pilar pendidikan pengurangan risiko bencana menempatkan sekolah sebagai ruang pembentukan kompetensi ketangguhan. Peserta didik perlu mengetahui bahaya, memahami kerentanan, mengenali jalur evakuasi, mengetahui tindakan penyelamatan diri, mampu meminta bantuan, dan memahami bagaimana menjaga keselamatan orang lain. Kompetensi tersebut harus disesuaikan dengan usia dan konteks lokal.

Kesenjangan pengetahuan-tindakan menjadi salah satu persoalan penting. Siswa mungkin dapat menjelaskan apa itu gempa, tetapi belum tentu tahu tindakan yang harus dilakukan ketika guncangan terjadi. Guru mungkin mengetahui teori mitigasi, tetapi belum terbiasa memimpin evakuasi. Karena itu, pendidikan bencana harus menekankan praktik. Simulasi, role-play, permainan edukatif, pemetaan partisipatif, dan latihan komunikasi dapat memperkuat transfer pengetahuan menjadi keterampilan. Peran guru sangat strategis. Kepala sekolah perlu memastikan guru mendapatkan penguatan kapasitas dan bahan ajar. Johnson dkk. (2014) menekankan pentingnya pendidikan bagi pendidik agar mereka memiliki kemampuan mengajarkan pengurangan risiko bencana. Guru yang percaya diri dan terlatih lebih mampu menenangkan peserta didik dan memberikan instruksi yang benar dalam kondisi darurat.

Materi dapat diintegrasikan melalui pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Misalnya, peserta didik dapat membuat peta risiko sederhana di sekitar sekolah, melakukan audit keselamatan kelas, menghitung kebutuhan air darurat, membuat panduan komunikasi keluarga, atau menulis cerita keselamatan. Kegiatan semacam itu menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai pengalaman belajar yang bermakna.

Pendidikan juga perlu memperhatikan inklusi. Peserta didik dengan disabilitas, usia lebih muda, atau kondisi sosial tertentu mungkin memiliki kebutuhan evakuasi yang berbeda. Oleh sebab itu, prosedur sekolah harus mempertimbangkan siapa yang memerlukan bantuan, siapa pendampingnya, serta bagaimana memastikan informasi dapat diterima oleh semua warga sekolah. Pendekatan CSS menekankan keselamatan dan partisipasi yang berkeadilan, sehingga inklusi merupakan bagian integral dari sekolah aman.

Manajemen Kontinuitas Pendidikan

Salah satu pengembangan penting dari konsep SPAB adalah keberlanjutan pendidikan. Sekolah aman tidak hanya dinilai dari kemampuannya mengevakuasi warga, tetapi juga dari

kemampuannya melanjutkan pembelajaran setelah gangguan. CSS menempatkan educational continuity management sebagai komponen inti karena bencana dapat mengganggu bangunan, tenaga pendidik, akses transportasi, jaringan komunikasi, dan kondisi psikologis peserta didik (GADRRRES, 2022).

Kepala sekolah perlu memiliki rencana kesinambungan pendidikan yang memuat skenario alternatif. Jika bangunan tidak dapat digunakan, di mana pembelajaran dilakukan? Jika sebagian guru terdampak, bagaimana pembagian tugas? Jika internet terganggu, apa alternatif bahan belajar? Jika peserta didik berpindah tempat, bagaimana komunikasi dan pemantauan pembelajaran dilakukan? Pertanyaan tersebut perlu dijawab sebelum krisis terjadi.

Pengalaman pandemi menunjukkan bahwa kesinambungan pendidikan membutuhkan fleksibilitas organisasi. Sekolah yang memiliki kapasitas digital dapat memanfaatkannya, tetapi strategi tidak boleh bergantung sepenuhnya pada internet. Modul cetak, radio komunitas, komunikasi telepon, atau pusat belajar sementara dapat menjadi alternatif sesuai konteks. Prinsip utama adalah memastikan hak belajar tetap dilindungi.

Pemulihan juga harus bertahap. Pada tahap awal, sekolah mungkin memprioritaskan keamanan dan dukungan psikososial. Selanjutnya, fokus bergeser pada pemulihan rutinitas, penguatan pembelajaran, dan evaluasi ketertinggalan. Kepala sekolah perlu menghindari tekanan untuk segera mengembalikan semua kegiatan seperti sebelum bencana apabila kondisi warga sekolah belum siap.

Kontinuitas pendidikan juga merupakan indikator kepemimpinan. Pemimpin yang proaktif menyiapkan skenario sebelum bencana, bukan menunggu sampai fasilitas rusak. Hal ini memperkuat argumentasi utama artikel bahwa SPAB harus mengubah paradigma sekolah dari reaktif menjadi proaktif.

Pengelolaan Psikososial dan Kepemimpinan Berbasis Empati

Bencana tidak hanya merusak fasilitas, tetapi dapat mengganggu rasa aman dan kesehatan psikososial warga sekolah. Peserta didik dapat kehilangan rumah, anggota keluarga, atau rutinitas. Guru juga dapat menjadi penyintas. Dalam situasi tersebut, kepala sekolah membutuhkan kepemimpinan berbasis empati. Empati bukan berarti mengabaikan target pendidikan, tetapi menempatkan kondisi manusia sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kepemimpinan yang empatik dimulai dari mendengarkan. Kepala sekolah perlu membuka ruang bagi guru dan peserta didik untuk menyampaikan kebutuhan. Hasil pemetaan kebutuhan dapat digunakan untuk menentukan prioritas dukungan. Sekolah juga dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau profesional terkait untuk memberikan dukungan psikososial sesuai kebutuhan dan kewenangan.

Komunikasi pemulihan harus menghindari stigma terhadap warga sekolah yang mengalami trauma. Kepala sekolah dapat membangun budaya saling mendukung melalui kegiatan kelompok, rutinitas yang aman, aktivitas bermain bagi anak, dan pemberian informasi yang menenangkan. Tujuan awal bukan memaksa warga sekolah melupakan pengalaman bencana, tetapi membantu mereka memperoleh kembali rasa aman dan kontrol terhadap kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif kepemimpinan, kemampuan menunjukkan kepedulian memperkuat kepercayaan. Ketika warga sekolah merasa didengar, mereka lebih mungkin mengikuti keputusan dan berpartisipasi dalam pemulihan. Hal ini sejalan dengan kajian kepemimpinan krisis yang menempatkan care, collaboration, communication, dan quick decision-making sebagai karakter penting kepemimpinan sekolah dalam krisis (Schechter, Da'as, & Qadach, 2024).

Namun, kepemimpinan empatik perlu didukung sistem. Jangan sampai seluruh beban dukungan psikososial diletakkan pada kepala sekolah. Jejaring dengan layanan kesehatan, pemerintah, dan tenaga profesional perlu dikembangkan agar sekolah memiliki rujukan ketika kebutuhan melebihi kapasitas internal.

Model Strategis Kepemimpinan SPAB

Berdasarkan sintesis literatur, artikel ini mengusulkan model strategis kepemimpinan SPAB yang menghubungkan tiga dimensi utama: struktural, kultural, dan jejaring. Ketiganya bekerja dalam siklus kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan pembelajaran. Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: kepemimpinan struktural menyediakan sistem dan sumber daya; kepemimpinan kultural membentuk perilaku dan nilai; kepemimpinan jejaring memperluas kapasitas melalui kolaborasi. Ketiganya diperkuat oleh komunikasi krisis, kepemimpinan instruksional, dan evaluasi berkelanjutan.

Pada tahap pra-bencana, kepala sekolah memulai dengan pemetaan risiko. Hasil pemetaan diterjemahkan menjadi prioritas dalam RKS/RKAS, pembentukan tim, SOP, pelatihan, simulasi, dan integrasi pembelajaran. Pada tahap tanggap darurat, fokus bergeser kepada keselamatan jiwa, komando, komunikasi, pencatatan, dan koordinasi eksternal. Pada tahap pemulihan, sekolah mengembalikan layanan secara bertahap, memberikan dukungan psikososial, dan melakukan perbaikan fasilitas. Pada tahap evaluasi, seluruh pengalaman menjadi pengetahuan organisasi yang digunakan untuk memperbaiki rencana.

Model tersebut menempatkan evaluasi sebagai proses pembelajaran organisasi. Setelah simulasi maupun kejadian nyata, sekolah melakukan after action review dengan pertanyaan: apa yang direncanakan, apa yang terjadi, apa yang berjalan baik, apa yang gagal, mengapa terjadi, dan apa perubahan yang harus dilakukan. Evaluasi tidak boleh berorientasi menyalahkan individu. Fokusnya adalah menemukan kelemahan sistem dan memperbaikinya.

Indikator keberhasilan model dapat dikembangkan dalam beberapa tingkat. Input meliputi kebijakan, tim, anggaran, fasilitas, dan jejaring. Proses meliputi pelatihan, simulasi, komunikasi, supervisi, dan pembelajaran. Output meliputi meningkatnya pengetahuan, tersedianya SOP, berfungsinya jalur evakuasi, dan meningkatnya keterlibatan pemangku kepentingan. Outcome meliputi berkurangnya risiko, meningkatnya kemampuan respons, serta lebih cepatnya pemulihan pembelajaran. Pada tingkat jangka panjang, dampak yang diharapkan adalah terbentuknya budaya keselamatan dan ketangguhan pendidikan.

Kerangka ini sejalan dengan CSS Targets and Indicators yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dan satuan pendidikan memonitor kemajuan keselamatan sekolah secara lebih terukur (GADRRRES, 2023). Dengan indikator yang jelas, SPAB dapat dipantau sebagai sistem kinerja, bukan hanya kumpulan kegiatan.

Tantangan Implementasi dan Strategi Pemecahan

Implementasi SPAB menghadapi tantangan struktural, kultural, dan sumber daya. Tantangan struktural dapat berupa kondisi bangunan yang belum memenuhi standar keselamatan, keterbatasan anggaran, atau belum terintegrasinya SPAB dalam perencanaan sekolah. Tantangan kultural dapat berupa anggapan bahwa bencana merupakan urusan BPBD, bukan urusan sekolah. Tantangan sumber daya manusia muncul ketika guru dan tenaga kependidikan belum memiliki kapasitas teknis yang memadai.

Tantangan lain adalah keberlanjutan program. Program dapat berjalan baik ketika ada kepala sekolah atau guru penggerak tertentu, tetapi melemah ketika personel tersebut berpindah. Hal ini menunjukkan pentingnya *institutional memory*. Dokumen SOP, peta risiko, kalender latihan, materi pelatihan, dan hasil evaluasi harus menjadi milik organisasi, bukan milik individu.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, sekolah perlu menerapkan prioritas berbasis risiko. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus. Sekolah dapat memulai dari tindakan berbiaya rendah tetapi berdampak tinggi, seperti memperjelas jalur evakuasi, menentukan titik kumpul, membuat daftar kontak darurat, melatih prosedur sederhana, dan melakukan simulasi. Secara bertahap, sekolah dapat mengembangkan perbaikan fasilitas yang membutuhkan investasi lebih besar.

Tantangan pengetahuan dapat diatasi melalui pengembangan komunitas belajar. Guru dapat berbagi pengalaman, melakukan *peer learning*, dan bekerja sama dengan BPBD atau perguruan tinggi. Pendekatan ini lebih berkelanjutan dibanding pelatihan satu kali tanpa tindak lanjut. Kemendikdasmen pada 2025 juga menekankan penguatan kapasitas pendidik dalam SPAB melalui berbagi praktik baik, SOP kedaruratan, dan simulasi sekolah (Kemendikdasmen, 2025). Dengan demikian, strategi pemecahan tidak dapat bersifat tunggal. Diperlukan kombinasi kebijakan, kepemimpinan, penguatan kapasitas, penganggaran, kemitraan, komunikasi, dan evaluasi. Kepala sekolah berfungsi sebagai pengintegrasikan berbagai unsur tersebut.

Implikasi Bagi Pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah

Temuan kajian memiliki implikasi bagi program pengembangan kepala sekolah. Kompetensi kepemimpinan selama ini sering berfokus pada pembelajaran, manajemen sumber daya, dan administrasi. Dalam konteks wilayah rawan bencana, kompetensi manajemen risiko dan kepemimpinan krisis perlu diposisikan sebagai bagian dari kompetensi kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah perlu memahami dasar penilaian risiko, komunikasi krisis, penyusunan rencana kontinuitas, koordinasi multipihak, dan dukungan psikososial.

Pelatihan sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis skenario. Kepala sekolah tidak cukup membaca modul, tetapi perlu berlatih menghadapi situasi simulatif: gempa terjadi saat pembelajaran, banjir mengisolasi sekolah, kebakaran muncul di ruang tertentu, atau jaringan komunikasi terputus. Setiap skenario dapat digunakan untuk menguji keputusan, komunikasi, pembagian peran, dan koordinasi.

Pengembangan kepemimpinan juga perlu memperkuat kemampuan reflektif. Setelah latihan, kepala sekolah dan tim perlu menilai bukan hanya apakah prosedur dijalankan, tetapi mengapa suatu tindakan berhasil atau gagal. Refleksi semacam ini membantu organisasi membangun pengetahuan dari pengalaman. Kebijakan pengembangan kepala sekolah juga perlu mendorong jejaring antarsekolah. Sekolah dapat saling bertukar praktik baik, terutama di daerah dengan ancaman yang serupa. Jejaring antarsekolah dapat memperkuat kapasitas kolektif dan mengurangi ketergantungan pada satu institusi.

Pada akhirnya, kepala sekolah yang tangguh bukan hanya kepala sekolah yang mampu menjaga administrasi tetap berjalan ketika kondisi normal, tetapi juga pemimpin yang mampu melindungi manusia, menjaga keberlanjutan pendidikan, dan menggerakkan komunitas ketika terjadi gangguan. Perspektif ini memperluas makna kepemimpinan pendidikan dari sekadar pencapaian akademik menuju ketahanan sistem pendidikan.

Implikasi Bagi Tata Kelola Sekolah dan Kebijakan

Pada tingkat tata kelola, SPAB perlu ditempatkan dalam siklus manajemen sekolah. Program tidak seharusnya berdiri sebagai proyek yang terpisah dari RKS, RKAS, kurikulum, pengembangan guru, dan evaluasi sekolah. Integrasi ini memungkinkan keselamatan menjadi bagian dari indikator kinerja dan pengambilan keputusan rutin.

Pada tingkat kebijakan daerah, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat. Sekolah berada di bawah ekosistem pemerintahan daerah, sedangkan urusan bencana melibatkan BPBD dan sektor lainnya. Karena itu, forum koordinasi SPAB di tingkat daerah dapat berfungsi sebagai ruang penyelarasan program, pengembangan kapasitas, dan pemantauan. Praktik pembentukan sekretariat bersama SPAB di daerah menunjukkan bahwa kelembagaan lintas sektor dapat digunakan untuk menjaga kesinambungan program.

Pemantauan juga perlu bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis hasil. Sekolah tidak cukup melaporkan bahwa simulasi telah dilaksanakan. Evaluasi perlu menilai apakah warga sekolah memahami peran, apakah waktu evakuasi membaik, apakah jalur evakuasi dapat digunakan, apakah informasi diterima orang tua, dan apakah ada tindak lanjut terhadap temuan. CSS Targets and Indicators menyediakan arah untuk pengembangan pemantauan yang lebih sistematis (GADRRRES, 2023). Kebijakan juga perlu memperhatikan ketimpangan kapasitas antarsekolah. Sekolah di daerah terpencil, wilayah kepulauan, atau kawasan dengan sumber daya terbatas mungkin memerlukan dukungan yang berbeda. Prinsip equity perlu diterapkan agar sekolah dengan risiko dan keterbatasan lebih tinggi memperoleh dukungan proporsional. Dengan demikian, keberhasilan SPAB merupakan hasil interaksi antara kepemimpinan sekolah dan dukungan sistem. Kepala sekolah merupakan aktor kunci, tetapi tidak boleh dibebani sebagai satu-satunya penanggung jawab. Pemerintah, masyarakat, orang tua, dan lembaga teknis memiliki peran masing-masing dalam membangun ekosistem sekolah aman.

PEMBAHASAN

Dari Program Ke Budaya Organisasi

Salah satu kontribusi konseptual artikel ini adalah penegasan bahwa SPAB harus bergerak dari “program” menjadi “budaya organisasi”. Program memiliki awal, jadwal, dan kegiatan tertentu; budaya tercermin dalam kebiasaan dan keputusan sehari-hari. Jika SPAB hanya dipahami sebagai simulasi tahunan, maka pengaruhnya terbatas. Sebaliknya, jika keselamatan menjadi nilai organisasi, setiap kegiatan sekolah akan mempertimbangkan risiko.

Perubahan tersebut membutuhkan konsistensi kepemimpinan. Kepala sekolah perlu menyampaikan pesan yang sama melalui kebijakan, tindakan, dan alokasi sumber daya. Misalnya, apabila kepala sekolah menyatakan keselamatan penting tetapi tidak menindaklanjuti laporan jalur evakuasi yang terhalang, warga sekolah akan menangkap ketidakkonsistenan. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara informasi, tindakan, dan hasil.

Budaya keselamatan juga membutuhkan psychological safety, yaitu lingkungan di mana guru dan peserta didik berani melaporkan risiko tanpa takut disalahkan. Jika guru takut menyampaikan bahwa fasilitas rusak atau SOP tidak berjalan, informasi risiko akan hilang. Karena itu, kepala sekolah perlu menciptakan mekanisme pelaporan yang sederhana dan responsif. Budaya juga diperkuat oleh simbol dan rutinitas. Poster keselamatan, tanda evakuasi, briefing singkat, pemeriksaan fasilitas, latihan, dan pembiasaan prosedur dapat menjadi pengingat. Namun simbol tidak boleh menggantikan tindakan substantif. Budaya akan kuat apabila simbol didukung praktik yang nyata.

Perspektif budaya organisasi memperlihatkan mengapa kepemimpinan kultural menjadi sangat penting. Infrastruktur dapat dibangun dalam waktu relatif cepat, tetapi budaya membutuhkan waktu, pengulangan, keteladanan, dan pembelajaran. Karena itu, keberhasilan SPAB harus dinilai dalam jangka menengah dan panjang.

Hubungan Tiga Dimensi Kepemimpinan

Ketiga dimensi kepemimpinan yang menjadi inti artikel memiliki hubungan yang saling memperkuat. Kepemimpinan struktural tanpa kepemimpinan kultural dapat menghasilkan SOP yang lengkap tetapi tidak dipatuhi. Kepemimpinan kultural tanpa dukungan struktural dapat menghasilkan antusiasme tetapi kekurangan fasilitas dan sistem. Sementara itu, keduanya tanpa kepemimpinan jejaring dapat menghadapi keterbatasan sumber daya dan akses ke keahlian eksternal.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai sistem. Struktur menyediakan “apa yang harus dilakukan dan dengan sumber daya apa”; budaya menjelaskan “mengapa keselamatan penting dan bagaimana orang berperilaku”; jejaring menjelaskan “dengan siapa sekolah bekerja untuk memperkuat kapasitas”. Ketika ketiganya berjalan bersama, SPAB memiliki peluang lebih besar untuk menjadi sistem yang berkelanjutan.

Dalam praktik, kepala sekolah dapat menggunakan tiga pertanyaan strategis. Pertama, pertanyaan struktural: apakah sistem dan fasilitas sekolah cukup aman? Kedua, pertanyaan kultural: apakah warga sekolah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang mendukung keselamatan? Ketiga, pertanyaan jejaring: apakah sekolah memiliki hubungan dan mekanisme koordinasi yang cukup untuk menghadapi risiko di luar kapasitas internal?

Ketiga pertanyaan tersebut dapat digunakan sebagai instrumen refleksi kepala sekolah. Jawaban yang diperoleh dapat menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut. Dengan demikian, kerangka artikel bukan hanya bersifat konseptual, tetapi dapat diterjemahkan menjadi alat evaluasi sederhana bagi sekolah. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa kepemimpinan SPAB bersifat adaptif. Ancaman, kapasitas, dan kebutuhan sekolah berbeda-beda. Karena itu, tidak ada satu paket implementasi yang identik untuk semua sekolah. Kerangka nasional menyediakan prinsip dan arah, sedangkan sekolah perlu melakukan kontekstualisasi berdasarkan profil risiko lokal.

KESIMPULAN

Kepemimpinan dalam Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) bukan sekadar menjalankan instruksi administratif, melainkan upaya strategis untuk melindungi warga sekolah dan menjamin keberlangsungan pendidikan. Kajian ini mempertahankan inti temuan naskah awal bahwa kepala sekolah memegang peran sentral dalam mengorkestrasi fasilitas fisik yang aman, kurikulum yang responsif terhadap bencana, budaya warga sekolah yang sigap, dan jejaring multipihak. Tiga dimensi kepemimpinan yang menjadi kerangka utama adalah kepemimpinan struktural, kultural, dan jejaring. Kepemimpinan struktural memastikan fasilitas, sumber daya, perencanaan, dan prosedur keselamatan tersedia. Kepemimpinan kultural membentuk kesadaran kolektif, pembiasaan, pembelajaran pengurangan risiko, dan perilaku aman. Kepemimpinan jejaring menghubungkan sekolah dengan keluarga, pemerintah, lembaga teknis, dan komunitas sehingga kapasitas penanganan risiko tidak terbatas pada sumber daya internal sekolah.

Dalam situasi VUCA, kepala sekolah dituntut adaptif. Pada tahap kesiapsiagaan, pendekatan partisipatif diperlukan untuk membangun komitmen. Pada tahap tanggap darurat, keputusan cepat dan komunikasi yang jelas menjadi prioritas. Pada tahap pemulihan, kolaborasi, empati, dan pengelolaan kontinuitas pendidikan menjadi penting. Dengan demikian, kepemimpinan SPAB merupakan kepemimpinan situasional yang tetap berlandaskan keselamatan, partisipasi, dan keberlanjutan. Kajian juga menunjukkan bahwa regulasi saja tidak menjamin keberhasilan implementasi. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik harus dijumpai melalui kepemimpinan yang konsisten, penguatan kapasitas guru, penganggaran berbasis risiko, simulasi yang dievaluasi, komunikasi krisis, dukungan psikososial, dan jejaring multipihak. SPAB harus diposisikan sebagai sistem tata kelola, bukan kegiatan tambahan.

Implikasi utama artikel adalah perlunya perubahan paradigma dari reaktif menjadi proaktif. Sekolah yang tangguh bukan sekolah yang tidak pernah mengalami bencana, melainkan sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko, merespons secara cepat, melindungi warga sekolah, menjaga keberlanjutan pembelajaran, dan belajar dari setiap kejadian. Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan kepala sekolah di masa depan perlu memasukkan manajemen risiko bencana, komunikasi krisis, kepemimpinan adaptif, dan educational continuity sebagai kompetensi penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W., & Kanegae, H. (2013). The effect of different disaster education programs on tsunami preparedness among schoolchildren in Aceh, Indonesia. *Disaster Mitigation of Cultural Heritage and Historic Cities*, 7, 165–172.
- Altun, S. A. (2025). School principals' crisis management and leadership roles in post-earthquake educational environments. *International Journal of Educational Management*, 39(4), 1061–1079.
- Amri, A., Bird, D. K., Ronan, K., Haynes, K., & Towers, B. (2018). Disaster risk reduction education in Indonesia: Challenges and recommendations for scaling up. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(2), 595–612.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2012). Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Risiko Bencana Indonesia. Jakarta: BNPB.
- Bush, T. (2020). *Theories of Educational Leadership and Management*. London: SAGE Publications.
- Djalante, R., Garschagen, M., Thomalla, F., & Shaw, R. (2017). *Disaster risk reduction in Indonesia: Progress, challenges, and issues*. Springer International Publishing.
- Federal Emergency Management Agency. (2010). *Developing and Maintaining Emergency Operations Plans: Comprehensive Preparedness Guide (CPG) 101*. Washington, DC: FEMA.
- Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. (2022). *Comprehensive School Safety Framework 2022–2030: For Child Rights and Resilience in the Education Sector*. GADRRRES.
- Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. (2023). *Comprehensive School Safety Targets and Indicators 2022–2030*. GADRRRES.
- Johnson, V. A., Ronan, K. R., Johnston, D. M., & Peace, R. (2014). Evaluations of disaster education programs for children: A methodological review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 9, 107–123.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). Modul 1: Konsep Dasar Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jakarta: Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Kemendikdasmen perkuat kapasitas pendidik dalam mengimplementasikan SPAB di satuan pendidikan. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Partisipasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2025. Jakarta: Sekretariat Nasional SPAB.
- Maly, E. (2018). Building back better with the three pillars of comprehensive school safety. *Journal of Disaster Research*, 13(7), 1252–1263.
- Mutch, C. (2015). Leadership in times of crisis: The role of school principals. *Journal of Educational Leadership, Policy and Practice*, 30(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Petal, M. (2008). Disaster risk reduction education. In *Disaster Prevention and Management*.
- Pollock, K., Nielsen, R., & Singh, S. (2023). School principals' work intensification and resilience: A call for structural change. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, 203, 2–12.
- Potter, P. D., Pavlakis, A. E., & Roberts, J. K. (2021). Calming the storm: Natural disasters, crisis management, and school leadership. *Journal of Cases in Educational Leadership*, 24(2), 96–111.
- Schechter, C., Da'as, R., & Qadach, M. (2024). Crisis leadership: Leading schools in a global pandemic. *Management in Education*, 38(4), 164–171.
- Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana. (2020). Peta Jalan Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana 2020–2024. Jakarta: Kemendikbud.
- UNESCO & UNICEF. (2014). *Towards a Learning Culture of Safety and Resilience: Technical Guidance for Integrating Disaster Risk Reduction in the School Curriculum*. Paris/New York: UNESCO and UNICEF.